ISSN : 2302-576X

**JURNAL COMMUNITY SOCIETY
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG**

Volume II, Edisi No. 2, Januari-Juni 2013

ISSN 2302-576X

1. Pengaruh Elite Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Sarana Air Bersih Di Desa Ngalkoja Kabupaten Ende
Zainur Wula.....1-12
2. Politisasi Isu Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Nusa Tenggara Timur
Ahmad Atang.....13-18
3. Pemahaman Orang Tua Terhadap Manfaat Imunisasi Di Kelurahan Manulai li Kecamatan Alak Kota Kupan
Bacotang./Salmon Nalenan.....19-31
4. Pencucian Uang Dalam Perspektif Ontologis Dan Paradigma Postpositivisme
Burhanuddin Gesi..... 32-43
5. Polisi Dan Kriminalitas Studi Kasus Penanganan Kriminal Pencurian Oleh Sat Reskrim Polres Kupang
Burhan Kiko.....44-53
6. Rendahnya Minat Sekolah Anak-Anak Studi Kasus Di Desa Besmarak Kecamatan Neka Mese Kabupaten Kupang
Idris//Sarifudin Ahmad.....54-62
7. Peranan Polsekta Maulafa Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang
Nurdin63-72
8. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Menurut Hukum Islam Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Di Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
Syarifuddin Darajad.....73-85
9. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Orang Lamaholot Di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
Welem Nggonggoek.....86-96
10. Implementasi Hak Azasi Manusia Terhadap Kebijakan Publik
Rahmad Majid.....97-104
11. Pengaruh Tenaga Kerja Wanita (Tki) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lewotala Kecamatan Larantuka
Wahid Hasyim TRA Beni.....105-113

PENERBIT

**FAK: ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KUPANG 2013**

ISSN : 2302-576X

JURNAL COMMUNITY SOCIETY
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG

Volume II, Edisi No. 2, Januari-Juni 2013

ISSN 2302-576X

1. Pengaruh Elite Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Membangun Sarana Air Bersih Di Desa Ngalkoja Kabupaten Ende
Zainur Wula.....1-12
2. Politisasi Isu Agama Terhadap Kerukunan Umat Beragama Di Nusa Tenggara Timur
Ahmad Atang.....13-18
3. Pemahaman Orang Tua Terhadap Manfaat Imunisasi Di Kelurahan Manulai li Kecamatan Alak Kota Kupan
Bacotang./Salmon Nalenan.....19-31
4. Pencucian Uang Dalam Perspektif Ontologis Dan Paradigma Postpositivisme
Burhanuddin Gesi.....32-43
5. Polisi Dan Kriminalitas Studi Kasus Penanganan Kriminal Pencurian Oleh Sat Reskrim Polres Kupang
Burhan Kiko.....44-53
6. Rendahnya Minat Sekolah Anak-Anak Studi Kasus Di Desa Besmarak Kecamatan Neka Mese Kabupaten Kupang
Idris//Sarifudin Ahmad.....54-62
7. Peranan Polsekta Maulafa Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota Kupang
Nurdin63-72
8. Kesadaran Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Bagi Perempuan Menurut Hukum Islam Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Di Kelurahan Airmata Kecamatan Kota Lama Kota Kupang
Syarifuddin Darajad.....73-85
9. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Orang Lamaholot Di Kelurahan Postoh Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
Welem Nggonggoek.....86-96
10. Implementasi Hak Azasi Manusia Terhadap Kebijakan Publik
Rahmad Majid.....97-104
11. Pengaruh Tenaga Kerja Wanita (Tki) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Lewotala Kecamatan Larantuka
Wahid Hasyim TRA Beni.....105-113

PENERBIT

**FAK: ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KUPANG 2013**

**PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF ONTOLOGIS DAN
PARADIGMA POSTPOSITIVISME**

Oleh

Drs. Burhanudin Gesi

burhangesi@rocketmail.com

ABSTRACT

Money Laundering of the Indonesia'n has been infacted to economic's development. Money laundering also is one of the way's who user the money. It can be said that many person's in the world who hid or conceal fund source via the banck based on nedeed or wanted. The Indonesia'n money laundering casesses are attention focus by Indonesian governmen, if the connected to banck institution where money laundering of the wickedness achief 2 - 5 %. Indonesia'n government has been money laundering estabilishment the regulation 2010 th 8 to anticipated of the money laundering crime This condition caused by : first how its character's specially crime on Indonesian for long time notyet obtain the regulation how to arranged the banck forbidden or local bisnismen money yield acceptance crimed etc. No regulation to trace where are he did. A screet system for bancking tighten. Scond, what did the money laundering canbe efected the law of the economic's development of the Indonesia ??? The goal's money laundering has to protected of the Indonesia'n government, people's couldn't use it.

Keyword : Money Laundering, economic's development, law of effected, crime judge action.

KONDISI perekonomian yang melanda dunia juga memberi dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh terdepresiasi nilai rupiah sehingga berdampak pada krisis likuidasi yang pada akhirnya menimbulkan krisis perbankan. Keadaan ini membawa dampak yang buruk pada industri perbankan di Indonesia, sehingga kondisi likuidasi yang buruk, menjadikan ratio kecukupan modal bank (CAR) menjadi negatif dan kredit macet terjadi pada hampir semua bank di Indonesia. Sehingga pada akhirnya pada bulan November 1997 sebanyak 16 Bank dilikuidasi (ditutup).

Likuidasi terhadap Bank-bank pemerintah dan swasta memberi dampak pada masyarakat menjadi tidak percaya pada institusi perbankan, sehingga mereka bersama-sama menarik simpanan mereka sehingga bank mengalami rush (penarikan

dana secara besar-besaran). Terjadinya rush atau penarikan simpanan nasabah pada bank secara serentak, menyebabkan bank-bank yang pada awalnya sehat menjadi sakit atau kesulitan likuidasi. Menghadapi permasalahan tersebut Bank Pengawas dan Pembina Bank-Bank Nasional yang berada di wilayah hukum Indonesia memberikan paket bantuan berupa Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI).

Di samping itu Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang

telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu factor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya yaitu kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan.

Di Indonesia masalah *money laundering* kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang telah mencapai 2 – 5 %. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya membentuk undang-undang tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) yang merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat untuk kejahatan pencucian uang.

Keadaan yang demikian disebabkan karena : **Pertama**, Indonesia pada waktu itu belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis local untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pelacakan darimana uang tersebut diperoleh, tetapi justru diatur system kerahasiaan perbankan yang ketat. **Kedua**, para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang dapat mereka masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonomian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing telah menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik untuk dimasuki.

Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk memerangi praktek pencucian uang. Di samping itu Indonesia mendapat desakan dari

berbagai Negara maju dan lembaga internasional agar Indonesia melarang masuknya uang hasil kejahatan. Negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional dipersempit peluangnya untuk memutar dan mencuci uang.

Adapun kerahasiaan bank merupakan aspek yang menguntungkan bagi kemungkinan masuknya uang kotor. Hanya saja kalau sejak awal ada informasi misalnya dari Interpol bahwa dana/uang tersebut berasal dari hasil kejahatan di suatu Negara, maka pihak penyidik Indonesia (sesudah mendapat ijin Menteri Keuangan, sesuai dengan Undang-Undang mengenai rahasia Bank), dapat melakukan pengusutan asal usul dana/uang tersebut.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ditentukan bahwa uang kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (Kapolri/Kapolda), Penuntut Umum (Jaksa Agung/Kepala Kejaksaan Tinggi), atau Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyediaan jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) sebagai tersangka atau terdakwa.

Problematisasi pencucian uang dalam bahasa inggris yang dikenal dengan sebutan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku hukum pidana atau kriminologi. Ternyata problematisasi uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara. Sebagai fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari

¹ Undang-Undang No. 25 tahun 2003. hal. 278

akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan yang pada satu sisi beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, namun pada sisi lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini akan terus merajalela.

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman ilegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang, dengan berkembangnya bisnis haram seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai milyaran rupiah sehingga kemudian muncul istilah *narco dollar*, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotika.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sector perbankan dewasa ini, banyak telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang mengingat sector inilah yang banyak menawarkan jasa instrument dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui yuridiksi Negara dengan memanfaatkan factor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Berkaitan dengan hal tersebut maka berkembanglah system tersebut dan masuk ke Indonesia, setelah itu merajalela sampai ke daerah-daerah.

1. Pengertian-Pengertian

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang syah.²

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang melalui : "*korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/tenaga kerja/imigran, perbankan, narkotik, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/imigran gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan*".³

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas system keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang sering kali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laundering*. Yang dimaksud dengan *money laundering* memang tidak ada definisi yang universal, karena baik Negara-negara maju dan Negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun di Indonesia telah sepakat mengartikannya dengan pencucian uang.

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat diasumsikan bahwa pencucian uang adalah "*kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul*

² Ibid. hal. 301.

³ Adrian Sute-di, 2006. hal. 19.

uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan pemindahan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari system keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah".

Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. Pencucian uang pada intinya melibatkan asset yang disamarkan sehingga dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang legal.

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, **Pertama**, melalui pengelapan pajak. Yang dimaksud dengan "penggelapan pajak" ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit dari pada yang diperoleh. **Kedua**, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, penjualan gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih.⁴

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu-lintas perdagangan narkotik dan obat-obatan sejenis itu. Namun kemudian *money leundring*

dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari usaha-usaha kejahatan lainnya, seperti yang dikemukakan sebelumnya.

Mengapa uang yang berasal dari organisasi kejahatan yang melakukan kegiatan usahanya dalam perdagangan narkotik perlu dicuci, kongres Amerika Serikat pada waktu membicarakan mengenai Undang-Undang.

Untuk mengetahui mengapa penjahat atau organisasi kejahatan perlu melakukan pencucian uang, maka John C. Keeney, mengatakan :

Pencucian uang hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut jumlahnya besar, oleh karena bila jumlahnya kecil, uang itu diserap kedalam peredaran secara tidak kentara. Uang itu dikonversi menjadi uang sah sebelum uang itu dapat diinvestasikan atau dibelanjakan, yaitu dengan cara pencucian yang disebut "pencucian"

Menurut pasal 1 angka 28 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri yaitu :

- Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
- Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah :

⁵ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Hal. 2

⁴ Op Cit. 2006. hal. 21

- c.1 Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
- c.2 Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c.3 Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- c.4 Pihak yang menurut penelitian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Selanjutnya pada pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁶ Dengan demikian maka keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank, bahkan apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan.

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang sebagai berikut:

a. Placement

Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*).

Karena uang itu sudah masuk kedalam system keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga masuk kedalam system keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam system keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah masuk kedalam system keuangan global atau internasional.

Jadi, *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain sebagai berikut.

- a) Menempatkan dana kepada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
- b) Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c) Menyelundupkan uang tunai dari satu Negara ke Negara lain.
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit pembiayaan.
- e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa lainnya.

Dengan perkataan lain, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini ialah memindahkan uang haram dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindari jejaknya. Atau secara lebih

⁶ Ibid. hal 7

sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui penegak hukum.

b. Layering

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidana melalui beberapa tahap transaksi keuntungan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain :

- a) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan/atau antar wilayah/Negara.
- b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pihak pencuci uang belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut kedalam system keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, yang pada gilirannya akan menarik para penegak hokum untuk melakukan tindakan.

Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank lain dan satu Negara ke Negara lain yang sering kali mereka memecah-mecah jumlahnya sehingga pemecahan dan pemindahan tersebut tidak dapat dilacak oleh otoritas atau penegak hukum.

Sering kali, nasabah menyimpan dana yang tercatat di bank justru bukan

pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah menyimpan uang tersebut mungkin telah yang kesekian kalinya apabila diurut sejak awal pangkalnya, yaitu pemilik sesungguhnya dari uang yang ditempatkan itu.

Dari urutan mereka yang dilalui oleh pemilik yang sesungguhnya dari uang itu sampai lapis yang terakhir yaitu nasabah penyimpan dana yang secara resmi tercatat di bank tersebut, maka pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itu dapat disebut pula *layering*.

c. Integration

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan yang material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utama adalah untuk menghilangkan atau untuk menyamarkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umunya dilakukan secara tumpang tindih. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal ini terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga perancangannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang

tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah berhasil diupayakan proses pencuciannya melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi "uang halal" (*clean money*) untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Kesemua perbuatan pencucian uang haram ini memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar untuk menjalankan dan mempertahankan ruang lingkup mereka dan kejahatan mereka atau untuk terus berproses di dalam dunia kejahatan khususnya narkoba.

Adapun perihal proses pencucian uang tersebut melalui empat proses, pertama, disebut dengan "membenamkan" uang haram sehingga tidak tampak dari permukaan, proses ini sangat sulit dilacak para petugas hukum karena menggunakan sistem yang sah, sistem pembenaman uang yang sah dilakukan melalui rekening koran, wesel pos, surat berharga atas tunjuk maupun instrument keuangan lainnya yang mudah dikonversi kedalam bentuk uang tunai dan tabungan dalam system perbankan.

Proses pencucian uang dilakukan melalui empat proses, pertama disebut sebagai *immersion* atau "membenamkan" uang haram sehingga tidak tampak dari permukaan. Dalam proses ini uang hasil kejahatan ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit dilacak oleh system pengawasan petugas hukum.

Jika system perbankan tidak dapat dipercaya masyarakat kembali kepada system tradisional. Erosi kepercayaan

masyarakat pada system perbankan terjadi karena keguncangan system politik sosial ataupun karena system devisa yang dikontrol ketat oleh pemerintah.

Pada tahap kedua, uang haram yang telah dibenamkan di bawah "permukaan air" tersebut diberi sabun dan diacak. Proses penyabunan dan pengacakan dilakukan dengan memanfaatkan undang-undang kerahasiaan bank maupun celah-celah peluang hukum, system politik yang "busuk" kelemahan administrasi serta system pembayaran maupun system perbankan yang ada diberbagai Negara. Dengan demikian peranan para ahli hukum serta pengacara, konsultan dan akuntan sangat menonjol dalam proses tersebut.

Di samping itu, uang haram dipindah pindahkan dari satu rekening ke rekening lain di bank di dalam negeri maupun di luar negeri melalui transaksi antar Negara. Tujuan transaksi tersebut adalah untuk menutup rahasia atau identitas pemilik yang sebenarnya. Prasarana tersebut juga dapat dilakukan melalui rekening perwalian milik pengacara, akuntan, maupun klien pemilik uang haram.

Tahap ketiga, proses pencucian uang haram disebut dengan proses pengeringan atau repatriasi dan integrasi. Pada tahap ini uang haram telah di "cuci" bersih dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk yang menurut aturan hukum telah berubah menjadi legal dan sudah membayar kewajiban pajak.

Kompleksitas tiap tahap proses pencucian uang dan besar kecilnya jaringan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tergantung pada volume uang haram yang akan di "putihkan". Sebagai contoh uang haram dalam jumlah besar hasil kejahatan gangster Al Capone, diputihkan oleh Meyer Lansky melalui

perjudian legal maupun *offshore banking*. Tujuan utama *offshore banking* adalah menjadi pelabuhan tempat transit uang haram. Setelah kuba jatuh ketangan rezim komunis di bawah Presiden fidel Castro, Meyer Lansky pindah ke Bahama yang dikembangkannya sebagai pusat perjudian dan hiburan serta "*offshore banking*" baru.

Dewasa ini, pusat-pusat *offshore banking* telah menjalar luas ke berbagai Negara miskin lainnya. Pada awalnya Negara tempat penyimpanan uang haram adalah Swiss, Luxemburg, Lichtenstein, Hongkong, dan Singapura. Daftar ini semakin bertambah dengan masuknya Panama, Antille Belanda, dan Cayman Island yang sekarang nyatanya paling disukai oleh bank-bank swasta maupun BUMN. Selain menawarkan bebas pajak, Negara-negara miskin tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengawasi bank maupun transaksi keuangan masyarakat sehingga merupakan tempat yang sangat ideal bagi kegiatan pemutihan uang.

Sebagaimana halnya dengan Negara-negara lain, Indonesia juga memberi perhatian besar terhadap tindak pidana lalu lintas Negara yang terorganisasi, seperti pencucian uang, dan terorisme. Pada tataran Internasional, upaya melawan kegiatan pencucian uang dengan membentuk satuan tugas *The Financial Action Task Force (FATF)*. Salah satu peran dari FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam memberantas dan mencegah pencucian uang. Sejauh FATF ini telah mengeluarkan 40 (empat puluh) rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta 8 (delapan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme. Oleh karena itu, sudah semestinya kalau

pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka perundang-undangan tersebut di bentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang tugas pokoknya membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya.

Kemampuan mencuci uang hasil tindak pidana melalui system keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk suksesnya kegiatan criminal sehingga setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan memanfaatkan kelemahan (*loopholes*) yang terdapat pada system keuangan. Pencucian keuangan sering hanya dihubungkan dengan bank atau perusahaan jasa keuangan lain, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Perlu juga diketahui bahwa selain produksi tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan juga lembaga nonkeuangan juga menarik para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang.

Lembaga keuangan lainnya maupun lembaga non keuangan dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain :

- a) Perusahaan Efek berfungsi sebagai Perantara Pedagang Efek
- b) Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi
- c) Money broker

- d) Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan
- e) Akuntan, Pengacara, dan Notaris
- f) Surveyor dan agen real estate
- g) Kasino dan Permainan judi lainnya
- h) Perdagangan logam mulia
- i) Dealer barang-barang antik, mobil serta penjualan barang-barang mewah dan berharga

Beberapa titik lemah dalam kegiatan pencucian uang sehingga mengakibatkan aktivitasnya dapat diidentifikasi adalah :

- 1) Masuknya dana tunai kedalam system keuangan
- 2) Pembawaan uang tunai melewati batas Negara
- 3) Transfer antar system uang
- 4) Transfer dari system keuangan keluar system keuangan
- 5) Pengambilalihan saham atau asset lainnya
- 6) Pembentukan kelompok usaha

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibah atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga karena tindak pidana pencucian uang. Selain pihak-pihak di atas, setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang juga dikategorikan telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan Pasal 6 undang-undang tersebut, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang. Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar).

2. Kajian Ontologi Perbankan

Jika berbicara tentang ontologi perbankan, maka yang ingin dibahas atau dikaji adalah ilmu perbankan dan ilmu ekonomi dimana objek sasaran adalah pencucian uang (*Money Loundry*) serta ruang lingkup berlakunya. Untuk itu yang pertama yang perlu disoroti adalah Direksi, pejabat atau pegawai bank perusahaan jasa keuangan lain dimana diharapkan dan dilarang memberitahukan kepada nasabah lain atau orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apa pun mengenai laporan transaksi keuangan mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*antitipping-off*). Bank atau perusahaan jasa keuangan lain dilarang menginformasikan kepada nasabah apabila hasil verifikasi transaksi tersebut dikategorikan dan dilaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

Tujuan adanya *antitipping-off* adalah:

- 1) untuk mencegah pihak yang dilaporkan (nasabah) mengalihkan dananya dan/atau melarikan diri sehingga mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan kasus tersebut.
- 2) untuk menjaga efektivitas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang

Apabila transaksi keuangan mencurigakan telah dilaporkan kepada

PPATK, maka dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut harus dipastikan bahwa pihak-pihak yang dilaporkan tidak menaruh kecurigaan akibat dari penyelidikan dan penyidikan tersebut. Untuk mencegah tindak pidana pencucian uang maka bank dan lembaga keuangan jasa lainnya wajib mengidentifikasi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan.

Pertama, melakukan suatu judgement atas dasar fakta-fakta yang kuat dan bukan hanya sekedar tidak adanya suatu informasi tertentu dari nasabah. **Kedua**, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang berlaku saat ini sesuai dengan keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi nasabah, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya. **Ketiga**, menganalisis suatu transaksi antara lain, misalnya :

- a. Apakah jumlah nominal dan frekuensi transaksi dengan kegiatan normal yang selama ini dilakukan oleh nasabah?
- b. Apakah transaksi yang dilakukan wajar sesuai dengan kegiatan usaha aktivitas dan kebutuhan nasabah?
- c. Apakah pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah tidak menyimpang dari pola transaksi umum untuk nasabah sejenis?

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. terdapat pokok-pokok penting dari amandemen tersebut, antar lain :

1. Penghapusan batas jumlah uang Rp 500 juta dalam definisi hasil kejahatan (Pasal 2).
2. Perubahan definisi transaksi keuangan mencurigakan dengan menambah elemen "termasuk menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan".
3. Pengurangan batas waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan menjadi 3 hari (semula 14 hari). Sehingga penyedia jasa keuangan memiliki kewajiban lebih cepat untuk melaporkannya kepada PPATK.
4. Pengaturan anti *tipping-off* yaitu larangan untuk memberitahukan laporan keuangan yang mencurigakan kepada PPATK dan aparat berwenang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ini dimuat beberapa hal yang dapat mendukung upaya memerangi kejahatan peredaran gelap narkoba.

1. Pasal 1 yang mengatur ruang lingkup subjek tindak pidana yaitu orang perseorangan atau korporasi sehingga bentuk-bentuk organisasi kejahatan yang kerap menjadi pelaku peredaran gelap narkoba.
2. Harta kekayaan yang berasal dari kejahatan penjualan narkoba dan psikotropika.
3. Ancaman pidana bagi percobaan, perbantuan, dan pemufakatan jahat.
4. Pertanggung jawaban pidana bagi korporasi dengan pemberatan pada ancaman maksimum ditambah 1/3.
5. Eliminasi ketentuan rahasia bank, sehingga penyidik, penuntut maupun hakim yang memeriksa perkara mampu menuntut nasabah dan simpanannya dari penyedia jasa keuangan.
6. Perintah penyitaan oleh hakim atas hasil bisnis narkoba.

7. Pemeriksaan dimuka persidangan dalam hal terdakwa tidak hadir dipersidangan.
8. Pembuktian terbalik sehingga pelaku kejahatanlah yang harus membuktikan bahwa hasil kekayaannya tidak didapat dari bisnis haram.
9. Penetapan hakim untuk menyita, mengambil harta kekayaan si pelaku setelah meninggal dengan bukti yang kuat.
10. Kerja sama internasional yang memungkinkan proses ekstradisi dan repatriasi asset hasil kejahatan gelap peredaran narkoba.

Salah satu hal terpenting dalam menentukan berjalannya rezim anti pencucian uang yang efektif adalah kerja sama segenap pihak terkait yang meliputi penyediaan jasa keuangan, PPATK, otoritas lembaga keuangan (Bank Indonesia, Bapepam, dan DJLK), kepolisian, kejaksaan, dan Pengadilan.

Dukungan tinggi, LSM dan pers juga dirasakan sangat penting dalam memasyarakatkan rezim *anti money laundering* di Indonesia. PPATK meyakini bahwa proses terciptanya rezim yang efektif sangat tergantung pada peran aktif segenap elemen di atas tanpa terkecuali.

3. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, maka sebagai penutup dari makalah ini adalah Bahwa Kejahatan Pencucian Uang di Dalam Kerahasiaan Bank merupakan suatu tindakan yang merugikan negara. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 6 undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR BACAAN.

- Abdullah, Azahar, 1997., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir., 1999, *Hukum Perbankan di Indonesia, Seri Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Melayu. S.P. 1996., *Manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*. Cet. III. Gunung Agung, Jakarta.
- Komaruddin, 1994., *Kamus Perbankan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sutedi, Ardian, 2006, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wiraatmadja, Rasjim, 1999., *Ketentuan rahasia Bank Menurut UU No. 10 Tahun 1998 serta Dampaknya terhadap Perbankan Indonesia dan kejahatan Ekonomi*, Jurnal Hukum Bisnis; Volume 8.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diganti dengan Undang-Undang No 03 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001